

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Pariwisata

Kegiatan wisata terdiri dari beberapa komponen utama berikut ini :

1. Wisatawan

Adalah orang yang melakukan perjalanan pariwisata atau sebagai aktor dari kegiatan wisata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pariwisata adalah yang berhubungan dengan perjalanan untuk rekreasi dan pelancongan; wisatawan adalah orang yg berwisata; pelancong; turis.¹ Menurut Undang-Undang, Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk perusahaan, daya tarik dan atraksi wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata. Pengertian tersebut meliputi: semua kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan wisata, sebelum dan selama dalam perjalanan dan kembali ke tempat asal, perusahaan daya tarik atau atraksi wisata (pemandangan alam, taman rekreasi, peninggalan sejarah, pagelaran seni budaya). Usaha dan sarana wisata berupa: jasa, biro perjalanan, pramu wisata, usaha sarana, akomodasi dan usaha lain yang berkaitan dengan pariwisata.²

2. Elemen geografi dari Pergerakan wisatawan

a. Daerah Asal Wisatawan (DAW)

¹ Ebta Setiawan, KBBI Offline, diambil dari <http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/>.

² Lihat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Merupakan tempat ketika ia melakukan aktivitas keseharian, seperti bekerja, belajar, tidur, dan kebutuhan dasar lainnya. Rutinitas itu sebagai pendorong untuk memotivasi seseorang berwisata. Dari DAW, seseorang dapat mencari informasi tentang obyek dan daya tarik wisata yang diminati, membuat pemesanan dan berangkat menuju daerah tujuan.

b. Daerah Transit

Tidak seluruh wisatawan harus berhenti di daerah itu. Namun, seluruh wisatawan pasti akan melewati daerah tersebut sehingga peranan DT pun penting. Seringkali terjadi, perjalanan wisata berakhir di daerah transit, bukan di daerah tujuan. Hal inilah yang membuat negara-negara seperti Singapura dan Hong Kong berupaya menjadikan daerahnya multifungsi, yakni sebagai Daerah Transit dan Daerah Tujuan Wisata.

c. Daerah Tujuan Wisata

Daerah ini sering dikatakan sebagai *sharp end* (ujung tombak) pariwisata. Di DTW ini dampak pariwisata sangat dirasakan sehingga dibutuhkan perencanaan dan strategi manajemen yang tepat. Untuk menarik wisatawan, DTW merupakan pemacu keseluruhan sistem pariwisata dan menciptakan permintaan untuk perjalanan DAW. DTW juga merupakan *raison d`etre* atau alasan utama perkembangan pariwisata yang menawarkan hal-hal yang berbeda dengan rutinitas wisatawan

3. Industri Pariwisata

Elemen ketiga dalam sistem pariwisata adalah industri pariwisata. Industri yang menyediakan jasa, daya tarik, dan sarana wisata. Industri yang merupakan unit-unit usaha atau bisnis didalam kepariwisataan dan tersebar diketiga area geografi tersebut. Sebagai contoh, biro perjalanan wisata bisa ditemukan di daerah asal wisatawan, penerbangan bisa ditemukan baik di daerah asal wisatawan maupun di daerah transit, dan akomodasi bisa ditemukan di daerah tujuan wisata.³

Dalam Undang-undang dijelaskan bahwa:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
4. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara

³ Dayu Trisna, *Konsep Dasar Pariwisata*, dalam <https://id.scribd.com/document/325787031/KONSEP-DASAR-PARIWISATA-doc> dan <https://blog.djarumbeasiswaplus.org/galangputra/2014/05/07/konsep-dan-definisi-pariwisata-manajemen-pariwisata-collaborative-governance/> diakses pada 10 desember 2017.

wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

5. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
6. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
7. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
8. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
9. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
10. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

11. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
12. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.
13. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
15. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepariwisataan.⁴

Sesuai dengan Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan, usaha pariwisata digolongkan ke dalam:

1. Usaha Jasa Pariwisata
 - a. Jasa biro perjalanan wisata adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang, atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata

⁴ Lihat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

- b. Jasa agen perjalanan wisata adalah badan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara didalam menjual atau mengurus jasa untuk mengurus perjalanan.
- c. Usaha jasa Pramuwisata adalah kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinir, dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata.
- d. Usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran adalah usaha dengan pokok memberikan jasa pelayanan bagi satu pertemuan sekelompok orang (misalnya negarawan, usahawan dan cendekiawan) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama.
- e. Jasa Impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan baik yang mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan atau menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.
- f. Jasa konsultasi pariwisata adalah jasa berupa saran dan nasehat yang diberikan untuk penyelesaian masalah-masalah yang mulai timbul dan penciptaan gagasan, pelaksanaan operasinya dan disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang telah diakui serta disampaikan secara lisan, tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli profesional

- g. Jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan.
2. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata merupakan :
- a. Usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai obyek dan daya tarik untuk dijadikan sasaran wisata.
 - b. Usaha seni budaya bangsa yang telah dilengkapi sebagai obyek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata.⁵

A. Konsep Dasar Pariwisata syari'ah

DSN MUI telah mengeluarkan fatwa tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah terdapat sejumlah ketentuan terkait standardisasi dan SDM seperti yang akan dijelaskan.⁶ Meskipun pada dasarnya memiliki kesamaan dengan konsep dasar Pariwisata konvensional selain aturan syari'ah.

1. Kriteria Umum Pariwisata Syari'ah

Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif dan BPH DSN-MUI pariwisata Syari'ah mempunyai kriteria umum sebagai berikut :

- a. Berorientasi pada kemaslahatan umum.
- b. Berorientasi pada pencerahan penyegaran dan ketenangan.
- c. Menghindari kemusyrikan dan kufarat.

⁵ Admin, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kecil dikawasan Makam Bung Karno di Blitar (Studi Pada Lokasi Wisata Makam Bung Karno di Blitar,)* dalam <http://www.pekerjadata.com/2014/01/SRIPSI-Faktor-Mempengaruhi-Pendapatan-Pedagang-Kecil-dikawasan-Makam-Bung-Karno-Studi-Lokasi-Wisata-Blitar.html> diakses pada 12 Desember 2017

⁶ Lihat Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016

- d. Menghindari maksiat seperti zina pornografi pornoaksi minuman keras narkoba dan judi.
- e. Menjaga perilaku etika nilai luhur kemanusiaan seperti menghindari perilaku hedonis dan asusila.
- f. Menjaga amanah keamanan dan kenyamanan.
- g. Bersifat universal dan inklusif.
- h. Menjaga kelestarian lingkungan.
- i. Menghormati nilai-nilai social-budaya dan kearifan lokal.⁷

2. Beberapa Panduan Umum dalam Pariwisata Syari'ah :

a. Daya Tarik / Objek Wisata Syari'ah

- 1) Objek wisata meliputi wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan.
- 2) Tersedia fasilitas ibadah yang layak dan suci.
- 3) Tersedia makanan dan minuman yang halal.
- 4) Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang tidak bertentangan dengan kriteria umum pariwisata Syari'ah
- 5) Terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.

b. Akomodasi

Objek wisata Syari'ah harus memiliki akomodasi penginapan yang sesuai dengan standar Syari'ah tentu saja yang terbaik adalah apabila sudah ada hotel atau losmen syari'ah yang sudah mendapat sertifikat

⁷ Riyanto Sofyan, *Prospek Bsinis Pariwisata Syariah*, (Jakarta : Buku Republika, 2012), h.57

dari DSN MUI namun mengingat saat ini masih sedikit sekali hotel yang mendapat sertifikat Syari'ah dari DSN MUI sesuai Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.⁸ Maka paling tidak Hotel atau penginapan yang tersedia harus memenuhi hal-hal berikut :

- 1) Tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci.
- 2) Tersedia fasilitas memudahkan untuk beribadah
- 3) Tersedia makanan dan minuman halal.
- 4) Fasilitas dan suasana yang kondusif untuk keluarga dan bisnis.
- 5) Terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.

c. Penyedia Makanan dan Minuman

Seluruh restoran, kafe dan jasa boga di obyek wisata Syari'ah harus terjamin kehalalan makanan yang disajikannya sejak dari bahan baku, proses penyediaan bahan baku dan proses memasak. Cara yang paling baik adalah sudah mendapat sertifikasi halal dari LPPOM MUI, kalau belum dapat dilakukan mengingat berbagai kendala, maka minimal yang harus diperhatikan adalah :

- 1) Terjamin kehalalan makan minum dengan sertifikat halal MUI.
- 2) Ada jaminan halal dari MUI setempat atau tokoh muslim atau pihak yang dapat dipercaya dengan memenuhi ketentuan yang akan ditetapkan selanjutnya apabila poin a belum terpenuhi.

⁸ Lihat Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

3) Terjaga lingkungan yang sehat dan bersih

d. Spa Sauna Massage

Terdapat sejumlah hal khusus yang harus diperhatikan bagi fasilitas yang hendak melayani wisatawan dengan konsep Syari'ah di antaranya :

- 1) Terapis pria untuk pelanggan pria dan juga bagi wanita.
- 2) Tidak mengandung unsur pornoaksi dan pornografi.
- 3) Menggunakan bahan yang halal dan tidak terkontaminasi barang haram.
- 4) Tersedia sarana yang memudahkan untuk beribadah.

e. Biro Perjalanan

Biro perjalanan wisata syari'ah tidak perlu khusus memiliki kualifikasi Syari'ah namun yang penting biro perjalanan tersebut

- 1) Menyelenggarakan paket perjalanan atau wisata yang sesuai dengan kriteria umum pariwisata Syari'ah.
- 2) Memiliki daftar akomodasi yang sesuai dengan panduan umum akomodasi pariwisata Syari'ah.
- 3) Memiliki daftar usaha penyedia makanan dan minuman yang sesuai dengan panduan umum usaha penyedia makanan dan minuman pariwisata Syari'ah.

f. Pramuwisata (Pemandu Wisata)

Pramuwisata memegang peran penting dalam penerapan prinsip syari'ah di dunia wisata karena di tangannyalah eksekusi berbagai aturan syari'ah yang diterapkan dalam pariwisata Syari'ah Karena posisinya sebagai

pemimpin perjalanan wisata keimanan seorang pramuwisata menjadi faktor yang sangat prinsip dengan demikian seorang pramuwisata haruslah seorang muslim atau muslimah di samping harus memenuhi syarat berikut :

- a. Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syari'ah dalam menjalankan tugas.
- b. Berakhlak baik komunikatif jujur dan bertanggung jawab.
- c. Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan etika Islam.
- d. Memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku.⁹

g. Dasar Hukum

1) Anjuran Berwisata Dalam Islam

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bepergian, bahkan salah satu ulama Islam yang cukup terkenal bernama Ibnu Batutah, adalah salah satu explorer ulung asal maroko yang dikenal baik didunia barat maupun islam. Dalam bahasa islam kita mengenal istilah hijrah, berpindahnya seseorang (baik secara temporer maupun permanen) dari suatu tempat ke tempat lainnya yang lebih baik, karena dalam hijrah setidaknya ada tiga manfaat. *Mendapatkan ilmu yang baru, mendapatkan saudara yang barudan terbukanya pintu rejeki.* Karena hakikatnya Allah SWT sengaja telah menciptakan manusia dengan

⁹ Riyanto Sofyan, *Prospek Bsinis Pariwisata Syariah*, (Jakarta : Buku Republika, 2012), h.58

beragam suku dan budaya untuk saling mengenal, memahami budaya masing-masing untuk kemudian membuka pikirannya untuk kian bertakwa kepadaNya. Dalam surat *al- Hujurat* ayat 13 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.¹⁰

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ
النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٢٠

Artinya : Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.¹¹

¹⁰ *Mushaf Aisyah : Alqur'an dan Terjemah untuk Wanita*, (Bandung : Hilal, 2010), h.398

¹¹ *Ibid.*, h.517

Dalam surat diatas Allah SWT juga mengisyaratkan untuk berjalan dimuka bumi sebagai lahan yang telah Allah hamparkan bagi manusia untuk dijelajahi, dan dipelajari untuk kemudian diambil hikmahnya. Sehingga setiap muslim semakin dekat dengan keyakinanNya. Dan setiap non-muslim jadi tersadar dengan keagungan tuhan, lebih mengenal islam sebagai agama yang damai dan rohmatan lil alamin. Sehingga dapat menghilangkan kesan islamophobia yang selama ini banyak berkembang dalam arus pemikiran barat.

Dalam hadits juga dikatakan yang artinya : *“Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya pada saat istimewanya. “ Para shahabat bertanya, “Wahai Rasulullah saw, apakah saat istimewa itu? Beliau bersabda, “Hari dan malam pertamanya. Bertamu itu adalah tiga hari. Kalau lebih dari tiga hari, maka itu adalah sedekah.”* [HR. Bukhari dan Muslim].

Tamu yang disebut di dalam hadits di atas mencakup tamu mukmin maupun kafir. Kata *“dhaifahuh”* termasuk dalam *lafadz* umum, sehingga mencakup semua jenis tamu; baik tamu mukmin, kafir, laki-laki, maupun perempuan. Semua tamu wajib disambut dan dimuliakan serta dihormati berdasarkan *nash-nash* hadits di atas.

Seorang muslim juga diperintahkan untuk memenuhi hak-hak tamu, sekadar dengan kemampuannya.¹²

2) Peraturan Pemerintah

Menurut Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia disebutkan bahwa :

- a) Usaha Pariwisata adalah usaha penyediaan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata.
- b) Sertifikasi Usaha Pariwisata adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata melalui audit. Persyaratan tentang sertifikasi halal tertuang dalam buku HAS 23000 (Kebijakan, Prosedur dan Kriteria). Secara ringkas ada 11 hal yang patut diperhatikan guna mendapatkan SJH (Sertifikat Jaminan Halal). Yaitu: Kebijakan Halal, Tim Manajemen Halal, Pelatihan dan Edukasi, Bahan yang Halal, Merk Produk, Fasilitas Produksi, Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis, Kemampuan Telusur, penanganan Produk yang tidak memenuhi kriteria, Audit internal dan Evaluasi Manajemen.¹³
- c) Standar Usaha Pariwisata adalah rumusan kualifikasi usaha pariwisata dan/atau klasifikasi usaha pariwisata yang mencakup

¹² Maulana Hamzah dan Yudi Yudiana, *Analisis Komparatif Potensi Industri Halal dalam Wisata Syariah dengan Konvensional* dalam <http://catatan-ek18.blogspot.co.id/2015/02/analisis-komparatif-potensi-industri.html> diakses pada 21 Oktober 2017.

¹³ Lihat peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata

aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata. Sertifikat Usaha Pariwisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata kepada usaha pariwisata yang telah memenuhi standar.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia disebutkan bahwa Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrative yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Serta Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang selanjutnya disingkat KSPN adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.¹⁴

3) Perbedaan Pariwisata Konvensional, Religi dan Syari'ah

¹⁴ Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025

Tabel 2.1
Perbedaan Pariwisata Konvensional, Religi dan Syari'ah¹⁵

No	Item Perbandingan	Konvensional	Religi	Syari'ah
1.	Obyek	Alam, Budaya, heritage, kuliner	Tempat ibadah, peninggalan sejarah	Semuanya
2.	Tujuan	Menghibur	Meningkatkan	Meningkatkan spirit
3.	Target	Menyentuh kepuasan, dan kesenangan yang berdimensi nafsu, untuk menghibur semata.	Aspek spiritual menenangkan jiwa, mencari ketentraman batin semata.	Memenuhi keinginan dan kesenangan serta menumbuhkan kesadaran beragama.
4.	Guide	Memahami dan menguasai informasi. Sehingga bisa menarik wisatawan terhadap obyek wisata.	Menguasai sejarah tokoh dan lokasi yang menjadi obyek wisata.	Membuat turis tertarik pada obyek dan mem-bangkitkan spirit religiusitas. Mampu menjelaskan fungsi & peran syari'ah dlm membentuk kebahagiaan dan kepuasan batin.
5.	Fasilitas Ibadah	Sekedar perlengkapan	Sekedar perlengkapan	Menjadi bagian yg menyatu
6.	Kuliner	Umum	Umum	Spesifik yang halal
7.	Relasi Dengan Masyarakat Di Lingkungan Obyek Wisata	Umum, komplementer dan semata-mata mengejar keuntungan	Umum, komplementer dan semata-mata mengejar keuntungan	Spesifik yang halal, terintegrasi, interaksi, berdasar prinsip-prinsip, syari'ah.
8.	Agenda Perjalanan	Mengabaikan waktu	Peduli waktu perjalanan	Memperhatikan waktu.
9.	Obyek	Alam, Budaya, heritage, kuliner	Tempat ibadah, peninggalan sejarah	Semuanya

¹⁵ Riyanto Sofyan, *Prospek Bsinis Pariwisata Syariah*, (Jakarta : Buku Republika, 2012), h.56

B. Konsep Dasar Ekonomi Kreatif

Istilah Ekonomi Kreatif pertama kali diperkenalkan oleh tokoh bernama John Howkins, penulis buku "*Creative Economy, How People Make Money from Ideas*". menurutnya ekonomi Kreatif adalah kegiatan ekonomi dimana input dan outputnya adalah Gagasan. Benar juga, esensi dari kreatifitas adalah gagasan. Bayangkan hanya dengan modal gagasan, seseorang yang kreatif dapat memperoleh penghasilan yang sangat layak.¹⁶

Di Indonesia, Ekonomi Kreatif muncul melalui kebijakan negara. Pada Pemerintahan SBY telah meninggalkan *legacy* yang baik terkait pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Secara kronologis kebijakan ekonomi kreatif dimulai oleh pernyataan Presiden untuk meningkatkan industri kerajinan dan kreativitas bangsa, terselenggaranya Pekan Produk Budaya Indonesia 2007, yang berubah nama menjadi Pekan Produk Kreatif Indonesia 2009, terbitnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, hingga Perpres Nomor 92 Tahun 2011 yang menjadi dasar hukum terbentuknya kementerian baru yang mengurus ekonomi kreatif, yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Menteri-nya, Mari Elka Pangestu. Hingga kemudian pada 2012 terbitlah Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2012-2014.¹⁷

¹⁶ Admin, dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/31611/4/Chapter%20II.pdf> diakses pada 21 October 2017

¹⁷ Badan Ekonomi Kreatif Indonesia dalam <http://www.bekraf.go.id/profil> diakses Nopember 2016

Kemudian Presiden Joko Widodo membentuk lembaga baru non kementerian bernama Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). Badan ini bertanggung jawab terhadap perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Bekraf bertugas membantu presiden dalam merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi kreatif.¹⁸

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, perkembangan sektor ekonomi kreatif tumbuh 5,76% atau di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional 5,74%. Nilai tambahnya mencapai Rp 641,8 triliun atau 7% dari produk domestik bruto (PDB) nasional. Penyerapan tenaga kerja industri kreatif mencapai 11,8 juta orang atau 10,7% dari angkatan kerja nasional. Jumlah unit usahanya mencapai 5,4 juta unit atau 9,7% dari total nasional, sedangkan aktivitas ekspornya mencapai Rp 118 triliun atau 5,7% dari total ekspor nasional. Mengingat peluang ini, Indonesia sebagai negara berkembang harus mendorong industri kreatif sebagai penggerak ekonomi. Itu perlu dilakukan guna mengejar ketertinggalan Indonesia di bidang ekonomi melalui pengelolaan sumber daya yang bernilai ekonomi tinggi. Di Indonesia, ada 15 subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan, dari sebelumnya 12 subsektor.¹⁹ **Subsektor Ekonomi Kreatif** yang dimaksud yaitu:

- a. Periklanan (*advertising*) yakni komunikasi satu arah dengan menggunakan medium tertentu.

¹⁸ Lihat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Ekonomi Kreatif.

¹⁹ Jogja Travel dalam <http://www.jogja-travel.com/wisata-syariah/> diakses Nopember 2016.

- b. Arsitektur berkaitan dengan desain bangunan secara menyeluruh, baik dari level makro (*town planning, urban design, landscape architecture*) sampai level mikro (detail konstruksi).
- c. Pasar Barang Seni berkaitan dengan perdagangan barang-barang asli, unik dan langka serta memiliki nilai estetika seni dan sejarah yang tinggi melalui lelang, galeri, toko, pasar swalayan dan internet, meliputi barang-barang musik, percetakan, kerajinan, *automobile*, dan film;
- d. Kerajinan (*craft*) berkaitan dengan kreasi, produksi dan distribusi produk yang dibuat atau dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang berawal dari desain awal sampai proses penyelesaian produknya.
- e. *Design* berkaitan dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain produk, desain industri, konsultasi identitas perusahaan dan jasa riset pemasaran serta produksi kemasan dan jasa pengepakan;
- f. *fashion* berkaitan dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris mode lainnya, produksi pakaian mode dan aksesorisnya.
- g. Video, Film dan Fotografi berkaitan dengan kreasi produksi video, film, dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video dan film.
- h. Permainan Interaktif (*game*) berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer dan video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi. bukan sebagai hiburan semata-mata tetapi juga alat bantu edukasi;
- i. Musik berkaitan dengan kreasi atau komposisi, pertunjukkan, reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara;

- j. Seni Pertunjukkan (*showbiz*) berkaitan dengan usaha pengembangan konten, produksi pertunjukkan.
- k. Penerbitan dan Percetakan berkaitan dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, tabloid, dan konten digital serta kegiatan kantor berita dan pencari berita.
- l. Layanan Komputer dan Piranti Lunak (*software*) berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi, termasuk layanan jasa komputer, pengolahan data, serta desain portal termasuk perawatannya dan lain-lain.
- m. Televisi & Radio (*broadcasting*) berkaitan dengan usaha kreasi, produksi dan pengemasan acara televisi, penyiaran, dan transmisi konten acara televisi dan radio, termasuk kegiatan *station relay* (pemancar) siaran radio dan televisi;
- n. Riset dan Pengembangan (*R&D*) berkaitan dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi, serta mengambil manfaat terapan dari ilmu dan teknologi tersebut guna perbaikan produk & kreasi produk baru.
- o. Kuliner berkaitan dengan kekayaan makanan khas dan produk olahannya yang akan bersaing di pasar ritel dan pasar internasional dengan pemasaran, pengolahan, penyajian, pengemasan yang lebih tepat, menarik dan modern.²⁰

²⁰ Admin, *15 Jenis Sub Sector Industry Kreatif*, dalam <https://ilmuseni.com/film/sub-sektor-industri-kreatif> diakses pada 21 October 2017

C. Kondisi Wisata Syariah di Indonesia

Indonesia mempunyai modal dasar yang lebih baik dibanding negara lain dengan populasi penduduk terbesar keempat di dunia sekitar 273 juta orang dan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia sangat kondusif dalam menyambut wisatawan muslim. Negeri ini juga memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa. 16% dari binatang reptil & amfibi di dunia berada di Indonesia, dari 35 spesies primate, 25% endemik, 17% dari burung di dunia 26 endemik. 121 spesies kupu-kupu 44% endemik dan 12% dari mamalia di dunia. Khusus Papua presentasi flora endemik mencapai 60-70% dan 36% endemik *forest diversity*.

Indonesia memiliki hutan tropis terbesar setelah Brazil dengan 51 Taman Nasional dan merupakan negara *mega biodiversity* ketiga setelah Brazil dan Zaire. sekitar 59% Indonesia merupakan hutan tropis atau 10% dari Total luas hutan di dunia. terdapat sekitar 110 juta hektar hutan Indonesia tercatat sebagai hutan lindung di mana 18,7 hektar menjadi daerah konservasi. Dan seluruh objek di atas dapat menjadi tujuan pariwisata syari'ah, selain objek berupa peninggalan sejarah agama serta Negara seperti masjid dan museum yang tersebar hampir di seluruh pelosok Nusantara.²¹

Ditambah penghargaan paling bergengsi untuk pariwisata halal dunia, *World Halal Tourism Awards* 2016 yang merupakan ajang bagi pelaku industri yang bergelut dalam penyediaan barang atau jasa untuk pariwisata halal serta penghargaan ini menjadi salah satu tolak ukur bagi industri pariwisata halal

²¹ Riyanto Sofyan, *Prospek Bsinis Pariwisata Syariah*, (Jakarta : Buku Republika, 2012), h.28

dunia, telah diumumkan. Dilakukan di Abu Dhabi pada Selasa, 7-12-2016. Indonesia berhasil menyabet 12 dari 16 kategori yang diperebutkan dalam penghargaan ini. Setelah pada tahun sebelumnya Indonesia hanya mampu membawa beberapa penghargaan. "Kita harus mengkalibrasi apakah yang kita lakukan sudah pada jalur yang benar sesuai dengan standar dunia. Kemenangan ini juga meningkatkan rasa percaya diri dan kredibilitas bangsa Indonesia di mata dunia serta menjadi salah satu cara untuk mendatangkan para wisatawan mancanegara ke Tanah Air" ujar Arief Yahya. Adapun penghargaan yang diterima Indonesia adalah sebagai berikut:

1. *World's Best Airline for Halal Travellers* (Garuda Indonesia)
2. *World's Best Airport for Halal Travellers* (Sultan Iskandar Muda Internasional Airport, Aceh)
3. *World's Best Family Friendly Hotel* (The Rhadana Kuta, Bali)
4. *World's Most Luxurious Family Friendly Hotel* (Trans Luxury Bandung)
5. *World's Best Halal Beach Resort* (Novotel Lombok Resort and Villas)
6. *World's Best Halal Tour Operator* (ERO Tours Sumatera Barat)
7. *World's Best Halal Travel Website*
(www.wonderfullomboksumbawa.com)
8. *World's Best Halal Honeymoon Destination* (Sembalun Valley Region, NTB)
9. *World's Best Hajj & Umrah Operator* (ESQ Tours and Travel)
10. *World's Best Halal Destination* (Sumatera Barat)

11. *World's Best Halal Culinary* (Sumatera Barat)

12. *World's Best Halal Cultural Destination* (Aceh).²²

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Guna menghindari adanya plagiarisme, beberapa hasil penelitian dan publikasi yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Analisis Potensi Pariwisata Syariah dengan Mengoptimalkan Industri

Kreatif di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Oleh Haidar Tsany Alim, Andi Okta Riansyah, Karimatul Hidayah, Ikhwanul Muslim, **Adityawarman.**

Jurnal, *Jurusan Akuntansi dan Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.*

Isi : Minimnya pengetahuan masyarakat terkait Pariwisata Syariah padahal industry ini memiliki potensi luar biasa, apalagi ditunjang kemampuan dan kreativitas masyarakat Indonesia khususnya para pemudanya, terlihat dari para pelaku usaha yang mulai melahirkan generasi abru para pemuda. Sehingga dianggap perlu menekankan sosialisasi dan pedoman terkait hal tersebut.²³

2. Komodifikasi Pariwisata syari'ah NTB dalam Promosi Destinasi

Wisata Islami di Indonesia oleh Hafizah Awalia, Program Studi Ekonomi Universitas Airlangga, Indonesia. Jurnal.

²² Admin, *Indonesia Raih 12 Penghargaan Bergengsi di Ajang The World Halal Tourism Awards 2016*, dalam <http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/12/indonesia-raih-12-penghargaan-bergengsi-di-ajang-the-world-halal-tourism-awards-2016> diakses pada 21 Oktober 2017.

²³ Haidar Tsany Alim et.all, "Analisis Potensi Pariwisata Syariah dengan Mengoptimalkan Industri Kreatif di Jawa Tengah dan Yogyakarta" dalam <https://fossei.org/2016/02/01/analisis-potensi-pariwisata-syariah-dengan-mengoptimalkan-industri-kreatif-di-jawa-tengah-dan-yogyakarta/> diakses 20 September 2017.

Isi : Destinasi wisata halal menjadi *brand* baru bagi provinsi NTB. Daerah yang kuat akan pluralitas suku dan agamanya memperoleh label wisata halal. Hal ini penting dikaji jika melihat wacana pemerintah melakukan dominasi terhadap objek kuasanya melalui sektor ekonomi dan pariwisata. Karenanya, wacana wisata halal ini dapat ditinjau dengan menggunakan perspektif teori sosial post-modern Michael Foucault tentang diskursus dan kekuasaan: *elite* kuasa yang mampu menciptakan sebuah diskursus baru (wisata halal) untuk memperkuat dominasi politiknya. Kemudian dengan menggunakan perspektif Teori Baudrillard terhadap munculnya masyarakat konsumtif di NTB sebagai akibat komodifikasi modal dan dominasi dari para kapitalis.²⁴

3. Persepsi Konsumen Tentang Wisata Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Minat Berkunjung. Oleh Rizka R. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung.

Isi : Pariwisata syariah merupakan tujuan wisata baru di dunia saat ini, yang tidak hanya diminati oleh masyarakat muslim tetapi nonmuslim juga dapat menikmati. Mengkaji persepsi konsumen (Persepsi Nilai, Merek, dan Harga) tentang wisata syariah terhadap minat berkunjung khususnya para wisatawan di Bandar Lampung. Jenis penelitian ini adalah penelitian pengujian hipotesis. Dengan metode Regresi Linear Berganda. Menghasilkan Variabel Persepsi Nilai dan Merek memiliki pengaruh yang

²⁴ Hafizah Awalia, "Komodifikasi Pariwisata syaria'ah NTB dalam Promosi Destinasi Wisata Islami di Indonesia" JURNAL STUDI KOMUNIKASI Volume 1 Ed 1, March 2017 Page 19 – 30 dalam <http://dakwatuna.com> diakses 20 September 2017.

signifikan terhadap minat berkunjung konsumen dan Variabel Harga tidak berpengaruh secara signifikan. Variabel Persepsi Nilai, Variabel Merek dan Variabel Harga, secara simultan berpengaruh signifikan terhadap minat berkunjung konsumen.²⁵

4. Strategi Pengembangan Pariwisata Syariah untuk Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Muslim Domestik dan Mancanegara Di Kota Bandung. Oleh Ariqa Nurwilda Sugiarti. Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia.

Isi: Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal dalam pengembangan pariwisata syariah yang ada di Bandung, lalu menganalisis dan membuat strategi pengembangan yang sesuai. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode analisis data menggunakan Analisis SWOT yang kemudian didapatkan positioning kuadaran untuk menentukan strategi. Dalam penelitian ini menghasilkan strategi pengembangan pariwisata syariah untuk menjadi destinasi wisatawan muslim domestik maupun mancanegara. Langkah awal yang dapat ditempuh oleh pemerintah antara lain perbaikan sarana prasarana masjid, destinasi wisata, transportasi dan akses informasi. Lalu melakukan pendataan potensi pariwisata syariah dan men-

²⁵ Rizka R, *Persepsi Konsumen Tentang Wisata Syariah Dan Pengaruhnya Terhadap Minat Berkunjung*, (Lampung : Skripsi tidak diterbitkan), dalam <http://digilib.unila.ac.id/21279/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf> diakses 20 September 2017.

sosialisasikannya, membuat regulasi mengenai sertifikasi halal usaha pariwisata syariah bekerjasama dengan MUI.²⁶

5. Potensi Pengembangan Pariwisata Perhotelan Di Kota Semarang (Kajian Dari Perspektif Syariah). Oleh Harjanto Suwardono. Tesis, Program Studi Magister Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Isi: Penelitian bertujuan melihat potensi pengembangan pariwisata perhotelan di Semarang dari segi perspektif syariah melalui permintaan dan penawaran di pasar. Kajian dari aspek permintaan meliputi total kunjungan wisatawan domestik maupun asing ke Semarang; total kunjungan objek wisata syariah; tingkat hunian kamar tidur; banyak malam kamar terjual; banyak tamu yang menginap; rata-rata lama menginap. Sedangkan kajian dari segi aspek penawaran meliputi informasi promosi, banyak kamar yang tersedia, banyak malam kamar tersedia, dan pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan kurangnya peran pemerintah daerah kota Semarang bagi pengembangan pariwisata syariah yang ditunjukkan rendahnya pembangunan akomodasi penunjang, khususnya hotel syariah, dan menambah hotel konvensional sehingga tidak tercapainya titik *equilibrium*

²⁶ Ariqa Nurwilda Sugiarti, *Strategi Pengembangan Pariwisata Syariah Untuk Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Muslim Domestik Dan Mancanegara Di Kota Bandung*, (Bandung : Skripsi tidak diterbitkan), dalam <https://text-id.123dok.com/document/qo5gxg0y-strategi-pengembangan-pariwisata-syariah-untuk-meningkatkan-kunjungan-wisatawan-muslim-domestik-dan-mancanegara-di-kota-bandung.html> diakses 10 Oktober 2017.

pasar. dan tingginya tingkat ketidakpuasan akan pelayanan yang sudah tersedia bagi wisatawan syariah.²⁷

6. Analisis Pasar Pariwisata syariah Indonesia. Oleh Kurniawan Gilang Widagdyo. Jurnal, Universitas Sahid Jakarta.

Isi: Timur Tengah adalah prospek untuk wisatawan berpotensi dimasa depan dengan titik keberhasilannya pada rencana promosi dan pemasaran yang efektif. Membuat *gimmick di Airport* kedatangan untuk wisatawan dalam bahasa Arab, mengadakan kerjasama dengan agensi untuk membuat event di Indonesia dan mengundang *travel agent* dan *travelling wholesale*. Meningkatkan hubungan dengan *local Travel Agent* untuk menjangkau tepat pasar sasaran dengan maka harus bekerja sama dengan biro perjalanan dan maskapai penerbangan untuk memberikan sales promotion. *Tourism Representative Office (VITO)* perlu diaktifkan sebagai pemberi informasi mengenai produk-produk yang diminati oleh wisatawan khususnya Restaurant khas Timur Tengah, dan lain-lain.²⁸

7. Kajian Pengembangan Wisata Syariah. Oleh Dini Andriani Dkk.

Laporan Akhir Asisten Deputi Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan Kementerian Pariwisata 2015.

²⁷ Harjanto Suwardono, *Potensi Pengembangan Pariwisata Perhotelan Di Kota Semarang (Kajian Dari Perspektif Syariah)*, (Surakarta : Tesis tidak diterbitkan), dalam <http://digilib.uns.ac.id> diakses 10 Oktober 2017.

²⁸ Kurniawan Gilang Widagdyo, “Analisis Pasar Pariwisata syariah Indonesia” *The Journal of Tauhidinomics* Vol. 1 No. 1 (2015): 73-80 dalam <https://www.dakwatuna.com/2015/06/30/71035/analisis-potensi-pariwisata-syariah-dengan-mengoptimalkan-industri-kreatif-di-jawa-tengah-dan-yogyakarta/#axzz4tDehKo1q> diakses 10 Oktober 2017.

Isi : Pariwisata Syariah dipandang sebagai cara baru untuk mengembangkan pariwisata Indonesia yang menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai Islami. Kondisi pariwisata syariah di Indonesia masih belum maksimal. Padahal jika digarap lebih serius, potensi wisata syariah di Indonesia sangat besar. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan potensi destinasi wisata syariah di Indonesia, menganalisis kesiapan destinasi wisata melalui persepsi pelaku usaha wisata dan wisatawan dalam mengembangkan wisata syariah di Indonesia, dan menghasilkan strategi yang tepat untuk mengembangkan wisata syariah sesuai karakteristik destinasi wisata di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui FGD, wawancara mendalam dan penyebaran kuesioner terhadap 100 orang wisatawan di Aceh dan Manado. Berdasarkan hasil kajian ini, Aceh sudah cukup optimal mencanangkan wisata syariah dalam produk wisatanya namun masih memerlukan beberapa perbaikan atau strategi dalam menggaet wisman Malaysia sebagai market utamanya. Sementara, Manado ditemukan belum optimal atau belum siap dalam pengembangan wisata syariah dan masih cukup banyak yang harus disiapkan jika akan mengembangkan wisata syariah.²⁹

²⁹ Dini Andriani et.all, *Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah*, (Jakarta : Asisten Deputi Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata Kementerian Pariwisata, 2015), h.163

